

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Ujian Nasional

Pengertian ujian nasional menurut Hadi yakni sebuah sistem evaluasi pendidikan nasional pada tingkat dasar hingga menengah¹. Adapun pendapat dari Baharudin, ujian nasional adalah sistem evaluasi atau penilaian standar pendidikan dasar dan menengah secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan yang bertujuan sebagai data dalam rangka menyusun kebijakan pendidikan nasional². Syawal Gultom juga mendefinisikan bahwa ujian nasional merupakan sistem evaluasi standar pendidikan dasar dan menengah di Indonesia³. Oleh karena itu dapat dinyatakan bahwa ujian nasional adalah sistem evaluasi secara nasional untuk pendidikan dasar dan menengah.

Menurut pendapat Muntholi'ah, ujian nasional merupakan alat untuk mengukur kemampuan kognitif siswa⁴. Adapun Rustono dan Harris yang menyatakan bahwa ujian nasional merupakan ujian yang disusun oleh pemerintah dengan tujuan mengukur potensi pelajar dan menentukan taraf kompetensinya agar dapat dinyatakan lulus dari tingkat pendidikan yang ditempuh⁵. Azis dan Sugiman juga berpendapat bahwa ujian nasional merupakan salah satu proses pengukuran hasil belajar yang telah dilaksanakan secara nasional di

¹ Sumasno Hadi, "Ujian Nasional dalam Tinjauan Kritis Filsafat Pendidikan Pragmatisme", *Jurnal Ilmiah Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah*, 4: 1, (Januari 2014), 292.

² Baharudin, "Ujian Nasional dan Pembudayaan Siswa Aktif Belajar (Refleksi Pasca Putusan Permendikbud No. 5 Tahun 2015 tentang Kriteria Kelulusan Peserta Didik UN)", *Terampil*, 4: 1, (Juni, 2015), 95.

³ Yulia Elfiza, Rusman, dan M. Nasir. "Hubungan antara Hasil Uji Kognitif Try Out Ujian Nasional (UN) dengan Hasil Ujian Nasional (UN) Mata Pelajaran Kimia SMA Kota Banda Aceh Tahun Ajaran 2014/2015", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Pendidikan Kimia (JIMPK)*, 1: 3, (2016), 37.

⁴ Muntholi'ah, "Ujian Nasional, Dulu, Kini dan yang Akan Datang: Tinjauan Normatif", *Jurnal Pendidikan Islam*, 7: 1, (April, 2013), 175.

⁵ Rustono F. M. dan Harris Christanto, "Analisis Penilaian Perilaku Komunikasi Peserta Didik Sekolah Menengah pada Pelaksanaan Ujian Nasional (Studi Kasus pada Sistem Manual-2014 dan Online-2015 di SMPK 2 Penabur Jakarta)", *Komunikasi*, 9: 2, (September, 2015), 86.

Indonesia⁶. Berdasarkan penjelasan di atas dapat dinyatakan bahwa ujian nasional dijadikan sebagai alat untuk mengukur hasil belajar dalam aspek kognitif siswa.

Menurut pendapat Tilaar mengenai ujian nasional yakni sebagai bentuk upaya pemerintah untuk mengevaluasi tingkat pendidikan secara nasional dengan menetapkan standarisasi nasional pendidikan⁷. Menurut Ghofur, ujian nasional merupakan salah satu sarana evaluasi dalam pembelajaran skala nasional⁸. Adapun Hartanto yang mendefinisikan bahwa Ujian Nasional merupakan salah satu bentuk *mandated examination* (ujian yang diamanatkan atau di bawah pengawasan) yang didesain untuk menggambarkan tingkat pencapaian keseluruhan sistem pendidikan, bukan pencapaian individu tertentu. *Mandated examination* memiliki beberapa kegunaan, yaitu: a) hasil ujian dapat digunakan oleh para pembuat kebijakan pendidikan untuk mendeteksi kelemahan yang dimiliki; b) sebagai alat untuk melakukan perubahan dalam bidang pendidikan; c) memberikan informasi mengenai kondisi terkini dan kemajuan peserta didik serta kualitas sekolah; d) memberikan hasil ujian yang akuntabel guna memotivasi guru dan peserta didik untuk berusaha lebih baik⁹. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa ujian nasional adalah sistem evaluasi yang diselenggarakan oleh pemerintah untuk mengukur hasil belajar siswa serta meningkatkan mutu pendidikan secara nasional.

⁶ Azis dan Sugiman, "Analisis Kesulitan Kognitif dan Masalah Afektif Siswa SMA dalam Belajar Matematika Menghadapi Ujian Nasional", *Jurnal Riset Pendidikan Matematika*, 2: 2, (November, 2015), 163.

⁷ H. A. R. Tilaar, *Standarisasi Pendidikan Nasional: Suatu Tinjauan Kritis*, (Jakarta: Rineka Cipta., 2006), 109-110.

⁸ Abd. Ghofur, "Mereposisi *Mainstream* dan Dampak Psikologi Ujian Nasional", *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1: 1, (Desember, 2014), 40.

⁹ Setyo Hartanto, "Ujian Nasional (UN), Masih Perlukah?." *Widyaiswara LPPKS*, diakses dari [http://lppks.kemdikbud.go.id/file/UJIAN_NASIONAL_\(UN\)_MASIH_PERLUKAH.pdf](http://lppks.kemdikbud.go.id/file/UJIAN_NASIONAL_(UN)_MASIH_PERLUKAH.pdf), pada tanggal 5 Juli 2017.

B. Fungsi dan Tujuan Penyelenggaraan Ujian Nasional

Ujian nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah berfungsi sebagai dasar untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, pertimbangan berikutnya, serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan¹⁰. Menurut Ki Supriyoko, penyelenggaraan ujian nasional dijadikan sebagai tolak ukur kualitas pendidikan antar daerah, sebagai upaya standarisasi mutu pendidikan secara nasional dan sebagai sarana memotivasi siswa, orang tua, guru, dan pihak-pihak terkait untuk meningkatkan prestasi belajar siswa dalam menghadapi standar pendidikan¹¹. Arifin mengemukakan fungsi dari penyelenggaraan ujian nasional sebagai berikut:¹²

1. Alat pengendali mutu pendidikan secara nasional. Melalui penyelenggaraan ujian nasional diharapkan mutu pendidikan nasional dapat dikendalikan.
2. Mendorong peningkatan mutu pendidikan. Penyelenggaraan ujian nasional diharapkan dapat memotivasi sekolah untuk meningkatkan pembelajaran dan berusaha untuk mencapai hasil ujian nasional secara optimal.
3. Bahan pertimbangan untuk menentukan tamat belajar dan predikat prestasi siswa. Ujian nasional dijadikan bahan pertimbangan penentuan kelulusan dan penentuan predikat prestasi siswa.
4. Pertimbangan dalam seleksi penerimaan siswa baru pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa secara garis besar fungsi diselenggarakannya ujian nasional yakni sebagai upaya peningkatan mutu pendidikan nasional serta sebagai alat ukur kualitas pendidikan antar daerah.

Tujuan penyelenggaraan ujian nasional yakni untuk menilai pencapaian standar kompetensi lulusan pada mata pelajaran tertentu

¹⁰ Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Pasal 8 Nomor 23 Tahun 2016 tentang Standar Penilaian Pendidikan

¹¹ Khairil Anwar Notodipuro, "Ujian Nasional: Sarana Untuk Membangun Karakter Bangsa", (Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, 2012), 25.

¹² Zainal Arifin, *Evaluasi Pembelajaran: Prinsip, Teknik, dan Prosedur*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), 62.

secara nasional¹³. Penyelenggaraan ujian nasional juga bertujuan untuk mengetahui dan mengukur tingkat penguasaan materi pelajaran tertentu secara nasional¹⁴. Penjelasan yang sama juga diungkapkan oleh Notodipuro, bahwa ujian nasional bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu dalam kelompok ilmu pengetahuan dan teknologi¹⁵. Wijono dan Djemari juga berpendapat bahwa tujuan penyelenggaraan ujian nasional yakni untuk mengukur kemampuan siswa terhadap penguasaan kompetensi yang telah dicapai¹⁶. Oleh karena itu, dengan adanya penyelenggaraan ujian nasional dapat menilai ketercapaian kompetensi siswa secara nasional.

Adapun Saukah dan Agus berpendapat bahwa tujuan diselenggarakannya ujian nasional yakni untuk memetakan kualitas program pembelajaran dan sekolah secara nasional, mempertimbangkan penyeleksian untuk masuk ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, dan merencanakan beberapa tindakan korektif untuk mendukung peningkatan kualitas pendidikan di sekolah dan tingkat kabupaten¹⁷. Tujuan ujian nasional adalah untuk memperoleh gambaran pencapaian kompetensi siswa selama mengikuti pendidikan pada aspek pengetahuan¹⁸. Berdasarkan penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tujuan penyelenggaraan ujian nasional yakni untuk memetakan kualitas program pembelajaran di sekolah secara nasional, untuk dijadikan bahan pertimbangan memasuki jenjang pendidikan selanjutnya serta untuk mengukur ketercapaian kompetensi siswa pada aspek kognitif.

¹³ Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, *Kebijakan Perubahan Ujian Nasional*, (Jakarta: Kemdikbud, 2015), 4.

¹⁴ Ibid, halaman 35.

¹⁵ Ibid, halaman 11.

¹⁶ Slamet Wijono dan Djemari Mardapi, "Model Evaluasi Ujian Nasional Kompetensi Keahlian Teknik Pemesinan SMK", *Jurnal Penelitian dan Evaluasi Pendidikan*, 20: 2, (Desember, 2016), 235.

¹⁷ Ali Saukah dan Agus Eko Cahyono, "Ujian Nasional di Indonesia dan Implikasinya Terhadap Pembelajaran Bahasa Inggris", *Jurnal Pendidikan dan Evaluasi Pendidikan*, 19: 2, (Desember, 2015), 244.

¹⁸ Ibid, halaman 21.

C. Periodisasi Penyelenggaraan Ujian Nasional

Secara kronologis, ujian nasional mengalami beberapa kali perubahan baik nama maupun sistem penyelenggaraannya, yakni:¹⁹

1. Periode 1950-1964 disebut sebagai ujian penghabisan. Ujian penghabisan dilaksanakan secara nasional, di mana seluruh soal yang diujikan berbentuk esai dan dibuat oleh Departemen Pendidikan, Pengajaran dan Kebudayaan. Hasil ujian tidak diperiksa di sekolah tempat ujian, melainkan di pusat rayon.
2. Periode 1965-1971 disebut dengan ujian negara yang mencakup semua mata pelajaran sebagai materi yang diujikan. Bahan ujian dibuat oleh pemerintah pusat dan berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia. Ujian tersebut diberlakukan di semua jenjang yang ada di Indonesia, yang berada pada satu kebijakan pemerintah.
3. Periode 1972-1979 disebut sebagai ujian sekolah, di mana pemerintah memberi kebebasan setiap sekolah atau sekelompok sekolah menyelenggarakan ujian sendiri. Pembuatan soal dan proses penilaian dilakukan masing-masing sekolah atau kelompok. Pemerintah hanya menyusun pedoman dan panduan yang bersifat umum.
4. Periode 1980-2004 disebut sebagai EBTANAS (Evaluasi Belajar Tahap Akhir Nasional) yang menggunakan dua istilah ujian yakni EBTANAS untuk mata pelajaran pokok, dan EBTA untuk mata pelajaran non-EBTANAS. EBTANAS dikoordinasi pemerintah pusat dan EBTA dikoordinasi pemerintah provinsi. Kelulusan EBTANAS ditentukan oleh kombinasi dua evaluasi yakni EBTANAS dan EBTA kemudian ditambah nilai ujian harian yang tertera di buku rapor.
5. Periode 2001-2004, EBTANAS beralih nama menjadi UAN (Ujian Akhir Nasional) di mana soal UAN dibuat oleh Depdiknas sehingga pihak sekolah tidak bisa mengangkat nilai UAN. Selain itu, kelulusan ditentukan oleh nilai mata pelajaran secara individual dan apabila siswa yang tidak/belum lulus akan diberi kesempatan mengulang selang satu minggu sesudahnya.
6. Periode 2005-2014, UAN diganti namanya menjadi Ujian Nasional (UN) dengan penetapan standar nilai yang berubah setiap tahunnya. Pemerintah tidak lagi bertindak sebagai

¹⁹ Nurul Hidayah, Loc. Cit.

penyelenggara ujian nasional, tetapi melimpahkannya ke Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP).

7. Periode 2015-sekarang, pelaksanaan ujian nasional telah melibatkan teknologi yakni pergeseran sistem ujian nasional yang dilaksanakan secara konvensional (*paper based test*) ke komputerisasi (*computer based test*). Pada tahun 2015-2016, terjadi dua sistem pelaksanaan ujian nasional yakni UN-PBT (Ujian Nasional *Paper Based Test*) dan UN-CBT (Ujian Nasional *Computer Based Test*). Pada tahun 2017 terjadi perubahan nama penyebutan yakni Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) disebut sebagai Ujian Nasional Berbasis Kertas dan Pensil (UNKP) sedangkan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) disebut sebagai Ujian Nasional Berbasis Komputer (UNBK). Di tahun 2017 ini terdapat kebijakan bahwa nilai ujian nasional tidak menentukan kelulusan siswa.

D. Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT)

Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) adalah ujian nasional untuk mengukur aspek pengetahuan yang dilaksanakan dalam bentuk tertulis²⁰. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) adalah sistem ujian yang digunakan dalam ujian nasional dengan menggunakan naskah soal dan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) berbasis kertas²¹. Oleh karena itu dapat disimpulkan bahwa Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) yakni sistem evaluasi peningkatan mutu pendidikan nasional yang diselenggarakan secara tertulis dengan menggunakan kertas dan pensil. Berdasarkan media yang digunakan adalah kertas dan pensil, istilah *Paper Based Test* (PBT) sering disebut sebagai tes konvensional.

Prosedur pengerjaan UN-PBT yakni siswa diharuskan untuk menghitamkan salah satu jawaban yang dianggap benar di kertas Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN). Semua soal disajikan di atas kertas dan menjawab dengan menggunakan pensil²². Soal ujian berbentuk pilihan ganda sebanyak 40-50 nomor, dengan lima pilihan

²⁰ Ibid, halaman 22.

²¹ Ibid.

²²<http://www.e-sbmptn.com/2016/01/pengertian-cbt-dan-pbt-dalam-ujian.html> diakses pada tanggal 26 April 2016

jawaban. Soal-soal tersebut dikelompokkan menjadi beberapa paket soal.

Kelebihan Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) apabila ditinjau dari segi teknis pengerjaannya yakni peserta ujian dapat dengan mudah mencoret-coret lembar soal, mata lebih nyaman, bisa menyimpan jawaban sementara dengan cara menandai soal atau jawaban terlebih dahulu sebelum meyakini jawaban yang pasti²³. Apabila ditinjau dari segi penyelenggaraannya, UN-PBT dapat dilaksanakan secara serentak dengan jumlah peserta tes yang banyak. Siswa relatif memiliki kebebasan untuk menjawab soal, sehingga secara psikologis lebih merasa percaya diri dan tidak terikat.

Kekurangan menggunakan Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) yakni jawaban rawan sobek, memakan waktu lebih lama karena waktu akan banyak habis digunakan untuk mencoret atau menghitamkan jawaban dan cenderung lebih merepotkan bila hendak mengganti jawaban. Apabila dilihat dari teknis pengoreksiannya, UN-PBT membutuhkan waktu yang lama sehingga hal ini berpengaruh pada proses pengumuman hasil ujian²⁴. Lamanya selang waktu dari proses pengerjaan ujian sampai pengumuman hasil ujian menyebabkan resiko kecurangan menjadi tinggi, sehingga hasil tes tidak mampu menggambarkan kemampuan siswa yang sebenarnya.

E. Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT)

Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) adalah sistem ujian berbasis komputer yang digunakan dalam ujian nasional²⁵. Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) adalah sistem ujian yang digunakan dalam ujian nasional dengan menggunakan sistem komputer. Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) juga dapat diartikan sebagai evaluasi pembelajaran dalam bentuk tes

²³ Muchamad Arif, Skripsi Sarjana: “Korelasi Nilai Matematika Ujian Nasional dan Nilai Matematika Tes Penerimaan Siswa Baru dengan Prestasi Belajar Matematika”, Surabaya: UIN Sunan Ampel, 2014.

²⁴ Sudar, A. Yulianto, dan Wijayanto, “Pengembangan Uji Kompetensi Mandiri Berbasis Komputer untuk Meningkatkan Efikasi Diri Siswa”, *Jurnal Pendidikan Fisika Indonesia*, 10, (2014), 12.

²⁵ <http://un.kemdikbud.go.id/files/UN-2016-Fix.pdf> diakses pada tanggal 3 Januari 2017.

prestasi belajar yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat untuk mengetahui pencapaian siswa pada mata pelajaran tertentu yang telah dilaksanakan sesuai waktu yang ditentukan dengan bantuan fungsi-fungsi seperangkat komputer²⁶. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diartikan bahwa Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) adalah sistem evaluasi peningkatan mutu pendidikan nasional yang diselenggarakan dengan bantuan seperangkat komputer.

Istilah *Computer Based Test* (CBT) telah digunakan sejak tahun 1960. Terdapat dua teknik pengerjaan dalam *Computer Based Test* (CBT) yakni jenis pertama peserta mengisi tanggapan mereka pada kertas yang kemudian secara otomatis dimasukkan ke dalam komputer optik *mark reader* sedangkan untuk jenis yang kedua, peserta dapat langsung memasukkan jawaban mereka ke komputer dan langsung menerima umpan balik melalui komputer²⁷. Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) pada dasarnya menganut pada jenis yang kedua, yakni peserta ujian dapat memilih jawaban secara langsung di komputer, dapat memilih soal dan dapat menghapus jawaban yang telah dipilih sebelumnya layaknya di Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT).

UN-CBT dilaksanakan bersamaan dengan UN-PBT, namun akan berakhir berbeda karena dalam sehari hanya ada satu mata pelajaran yang diujikan, sedangkan jumlah peserta yang dapat menempuh UN-CBT setiap harinya dibatasi oleh jumlah atau ketersediaan komputer. Selain itu, penyampaian (*delivery*) butir soal yang tidak lagi menggunakan kertas (*paper*), baik untuk naskah soal maupun lembar jawaban soalnya. Sistem skoring atau koreksi langsung dilakukan oleh komputer²⁸.

Kelebihan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) yakni memudahkan dalam pengamanan dan penyediaan logistik serta lebih kecil kemungkinan terjadi keterlambatan naskah soal, tertukarnya naskah soal, dan ketidakjelasan hasil cetak naskah soal. Tidak ada kerumitan pengumpulan Lembar Jawaban Ujian Nasional (LJUN) dan gambar dalam soal menjadi lebih jelas, lebih

²⁶ Edy Marhatta Sofyan, Kesiapan Pelaksanaan ... 12.

²⁷ Jimoh, R. G. dkk, "Students' Perception of Computer Based Test (CBT) for Examining Undergraduate Chemistry Courses", *Journal of Emerging Trends in Computing and Information Sciences*, 3: 2, (Februari, 2012), 125.

²⁸ Ibid.

mengakomodasi siswa dengan ketunaan. Selain itu, John Poggio dkk mengatakan ujian berbasis komputer telah menjadi sistem evaluasi yang diinginkan karena langsung melaporkan skor dari kinerja siswa, meminimalisir biaya percetakan, pengiriman, keamanan yang telah mengalami perbaikan, serta dapat dilakukan secara berulang²⁹.

Kekurangan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) yakni kurangnya pemahaman beberapa peserta didik akan pelaksanaan ujian nasional karena berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Penyelenggaraan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) bergantung dengan adanya jaringan internet dan juga listrik. Apabila jaringan internet dan listrik mengalami gangguan pada saat ujian, maka dapat sangat mengganggu penyelenggaraan ujian nasional. Tidak semua wilayah atau sekolah yang menyelenggarakan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT) karena daerah yang sering mengalami pemadaman listrik serta kekurangan sarana komputer di satuan pendidikan³⁰.

F. Kredibilitas

Pada dasarnya kredibilitas dapat didefinisikan sebagai kepercayaan³¹. Selain itu kredibilitas juga didefinisikan sebagai kepercayaan, kehandalan, akurasi, keadilan, dan objektivitas³². Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kredibilitas adalah suatu perihal yang dapat dipercaya³³. Dalam arti luas, kredibilitas berarti kesediaan untuk mempercayai sesuatu³⁴. Oleh karena itu, kredibilitas dapat dikatakan sebagai sebuah kepercayaan terhadap suatu perihal.

²⁹ John Poggio dkk, "A Comparative Evaluation of Score Results from Computerized and Paper & Pencil Mathematics Testing in a Large Scale State Assessment Program", *The Journal of Technology, Learning, and Assessment*, 3: 6, (Januari, 2005), 5.

³⁰ Ibid, halaman 27.

³¹ C. Nadine Wathen dan Jacquelyn Burkell, "Believe It or Not: Factors Influencing Credibility on The Web", *Journal of The American Society for Information Science and Technology*, Vol. 53 No. 2, (Januari, 2002), 135.

³² Brian Hilligoss dan Soo Young Rieh, "Developing a unifying framework of credibility assessment: Construct, heuristics, and interaction in context", *Information Processing & Management*, 44, (November 2008), 1468.

³³ <http://kbbi.web.id/kredibilitas> diakses pada tanggal 4 januari 2016.

³⁴ Stewart L. Tubbs, Sylvia Moss, *Human Communication: Konteks-konteks Komunikasi*, (Bandung: Rosdakarya, 2001), 114.

Menurut Kotler dan Gary, kredibilitas didefinisikan sebagai kepercayaan terhadap sesuatu yang dapat merancang dan menghadirkan timbal balik sehingga dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan³⁵. Menurut Hardjana, kredibilitas merupakan sejauh mana meyakini keterpercayaan dan kemampuan akan sesuatu. Kredibilitas merupakan bagian dari citra yang baik sehingga menimbulkan kesan baik yang muncul dari pikiran³⁶. Adapun penjelasan dari Fogg dan Hsiang mengenai kredibilitas yang merupakan sebuah persepsi kualitas pada objek, orang, atau sepotong informasi³⁷. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa kredibilitas dapat dianggap sebagai persepsi kualitas suatu objek.

Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa kredibilitas dapat menghasilkan evaluasi dari beberapa dimensi secara bersamaan³⁸. Effendy, menjelaskan bahwa dalam kredibilitas terdapat tiga aspek yakni aspek keahlian, kepercayaan, dan daya tarik³⁹. Menurut Hovland dkk, definisi secara umum kredibilitas yakni sebuah kepercayaan dari sumber atau pesan, yang terdiri dari dua dimensi utama yakni kelayakan untuk dipercaya dan keahlian⁴⁰. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kredibilitas adalah evaluasi kelayakan untuk dipercaya dan keahlian terhadap suatu objek.

Menurut Moleong, fungsi kredibilitas yakni melaksanakan inkuiri atau penelaahan yang bersifat kritis, analisis, dan argumentatif (ilmiah) dengan menggunakan langkah-langkah tertentu untuk memperoleh tingkat kepercayaan terhadap suatu objek⁴¹. Berdasarkan pendapat Willemsen dkk, kredibilitas

³⁵ Philip Kotler dan Gary Armstrong, *Marketing Management*, (New Jersey: Prentice Hall, 2012), 203.

³⁶ Andre A. Hardjana, "Komunikasi dalam Manajemen Reputasi Korporasi", *Jurnal Ilmu Komunikasi*, No. 1, Vol. 5 (Juni, 2008), 10.

³⁷ Bj Fogg dan Hsiang Tseng, "The elements of Computer Credibility", *Chi*, 99, (Mei, 1999), 80.

³⁸ *Ibid.*

³⁹ Onong Uchjana Effendy, *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek. Cetakan kesembilanbelas*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2003), 215

⁴⁰ Andrew J. Flanagan dan Miriam J. Metzger, "The Credibility of Volunteered Geographic Information", *GeoJournal*, No. 72, (2008), 141.

⁴¹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Roesda Karya, 2007), 173.

digunakan sebagai alat untuk mengevaluasi keahlian dan kepercayaan terhadap suatu objek⁴². Kredibilitas juga dijadikan sebagai salah satu kriteria relevansi penilaian yang digunakan ketika membuat keputusan untuk menerima atau menolak⁴³. Berdasarkan beberapa penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa fungsi dari kredibilitas yakni dijadikan sebagai penelaahan yang bersifat kritis, analisis, dan argumentatif (ilmiah) untuk memperoleh kepercayaan terhadap suatu objek.

Merujuk pada penyelenggaraan ujian nasional, kredibilitas dapat didefinisikan sebagai bentuk evaluasi yang bersifat kritis, analisis, dan argumentatif (ilmiah) untuk mengukur tingkat kepercayaan dan keahlian pada penyelenggaraan ujian nasional. Kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional dijadikan sebagai bentuk penilaian dan penyempurnaan ujian nasional bahwasanya ujian nasional sangat perlu untuk terus dilaksanakan⁴⁴.

G. Kriteria Kredibilitas

Terdapat lima kriteria yang dijadikan acuan untuk menilai kredibilitas suatu objek. Kriteria tersebut disingkat dengan RAVEN yang terdiri dari R (*reputation*), A (*ability to observe*), V (*vested interest*), E (*expertise*), dan N (*neutrality*)⁴⁵. Adapun penjelasan secara mendalam dari masing-masing kriteria, yakni:

1. *Reputation*

Reputation merujuk pada kinerja atau karakteristik objek dalam perihal memperkuat atau melemahkan. Apabila reputasi objek baik maka akan memperkuat kredibilitas, begitupula sebaliknya jika reputasi objek tersebut buruk maka akan melemahkan kredibilitas.

2. *Ability to Observe*

Ability to observe merujuk pada kemampuan objek tersebut untuk mengamati atau menilai sehingga dapat

⁴² Lotte M. Willemsen dkk, "The Ironic Effect of Source Identification on the Perceived Credibility of Online Product Reviewers", *Journal of Computer-Mediated Communication*, 18, (2012), 17.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Ibid, halaman 30.

⁴⁵ Jacque Thwaites, dkk. "A Level Critical Thinking for OCR: Tailored resources to inspire your critical thinkers", 9. Diakses secara online di <http://www.pearsonschoolsandcolleges.co.uk/>

dijadikan sebagai perwakilan atau bentuk representasi dari suatu keadaan.

3. *Vested Interest*

Vested Interest merujuk pada apakah suatu objek tersebut memiliki maksud yang jelas sehingga dapat meminimalisir motif ketidakjujuran.

4. *Expertise*

Expertise merujuk pada keahlian yang relevan, keterampilan, pengalaman atau bentuk pelatihan objek tersebut dalam menafsirkan situasi yang sebenarnya.

5. *Neutrality*

Neutrality diartikan sebagai suatu objek tidak mendistorsi apa yang dilaporkan serta tidak memihak kepada siapapun atau dapat disebut dengan objektivitas.

H. Kredibilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional

Menurut Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, dalam penyelenggaraan ujian nasional yang berkualitas maka diperlukan beberapa dimensi yang mendukung. Salah satu dimensi tersebut yakni kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional. Di penelitian ini, peneliti akan mengacu pada kriteria RAVEN untuk menilai kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional. Berikut pembahasan mengenai lima kriteria kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional, yakni:

1. *Reputation*

Reputation memiliki arti dalam Bahasa Indonesia yakni reputasi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), reputasi adalah perbuatan atau suatu hal sebagai sebab mendapatkan nama baik⁴⁶. Berdasarkan Kamus Webster, reputasi diartikan sebagai suatu estimasi secara umum terhadap seseorang atau objek yang dinilai oleh orang lain, yang terdiri dari baik atau buruk serta sebagai bentuk kejujuran⁴⁷. Fombrun dan Shanley dalam Syahril mendefinisikan reputasi sebagai sebuah aktivitas yang berdasarkan karakteristik dari objek. Pendapat ini diikuti oleh Roberts and Dowling yang

⁴⁶ <http://kbbi.web.id/reputasi> diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

⁴⁷ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/reputation> diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

mendefinisikan reputasi sebagai representasi persepsi mengenai tindakan masa lalu dan prospek masa depan yang menggambarkan perbandingan objek secara keseluruhan dibandingkan dengan objek lainnya⁴⁸. Penjelasan-penjelasan tersebut menggambarkan bahwa reputasi dapat diartikan sebagai anggapan tentang suatu objek berdasarkan karakteristiknya.

Caves & Porter mengungkapkan bahwa reputasi merupakan gabungan dari aset dan aktivitas pengawasan. Reputasi juga dapat diartikan sebuah evaluasi keseluruhan yang dilakukan oleh pemegang kepentingan terhadap objek tersebut dari waktu ke waktu. Evaluasi tersebut didasarkan pada pengalaman langsung dari para pemegang kepentingan terhadap objek tersebut⁴⁹. Definisi yang sama diungkapkan oleh Triamanah bahwa reputasi merupakan penilaian terhadap sebuah organisasi atau produk yang didalamnya melekat faktor kepercayaan dari khalayak⁵⁰. Berdasarkan penjelasan tersebut, reputasi dapat diartikan sebagai sebuah penilaian berdasarkan pengalaman langsung yang dilakukan oleh publik.

Dewi Astuti menjelaskan bahwa reputasi merupakan hasil dari rangkaian beberapa interaksi yang kompleks dan bersifat multidimensional. Faktor-faktor kunci yang menentukan bobot interaksi tersebut meliputi enam hal berikut, yakni efektivitas bersaing, kepemimpinan, orientasi pada pengguna, keakraban, budaya organisasi, dan komunikasi. Berdasarkan penelitian yang dilakukannya, Walsh memaparkan bahwa konsumen menilai reputasi sebuah perusahaan melalui lima faktor, yaitu: ⁵¹

⁴⁸ L.M. Syahril Majidi, "Peranan Corporate Governance Terhadap Reputasi Dan Kinerja" (Paper presented at *Prosiding Seminar & Konferensi Nasional Manajemen Bisnis*, UPN Veteran Jawa Timur, 2012), 269.

⁴⁹ Indhira Hari Kurnia, dkk, "Strategi Humas Dalam Meningkatkan Reputasi Sekolah (Studi Kasus di SMA Negeri 1 Surakarta)", *Jupe UNS*, 1: 2, (April, 2013), 4-5.

⁵⁰ Triamanah, "Reputasi dalam Kerangka Kerja Public Relations", *Jurnal Ilmiah Komunikasi*, 3: 1, (Juli, 2012), 93.

⁵¹ Dewi Astuti, Tesis: "*Membangun Reputasi Perusahaan dengan Mengelola Opini Publik: Studi Kasus pada Program Talkshow Indonesia Lawyers Club tvOne*", (Jakarta: Universitas Indonesia, 2012), 20.

- a. Orientasi pelanggan, merujuk pada persepsi konsumen atas kesediaan karyawan perusahaan untuk memuaskan kebutuhan konsumennya.
- b. Pemberi kerja yang baik, merujuk pada persepsi konsumen mengenai bagaimana pihak perusahaan dan jajaran manajemen memperlakukan karyawannya dan memperhatikan kebutuhan mereka, dan harapan konsumen bahwa perusahaan memiliki karyawan yang kompeten.
- c. Perusahaan dapat diandalkan dan kuat secara finansial, merujuk pada persepsi konsumen terhadap perusahaan dalam hal kecakapan, ketangguhan, dan kemampuan dalam menghasilkan laba, serta harapan konsumen bahwa perusahaan menggunakan sumber keuangannya dengan cara yang bijaksana sehingga berinvestasi di perusahaan tersebut dipersepsikan memiliki resiko yang kecil.
- d. Kualitas produk dan jasa, merujuk pada persepsi konsumen akan kualitas, inovasi, nilai, dan kehandalan dari barang dan jasa yang dihasilkan perusahaan.
- e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, merujuk pada kepercayaan konsumen bahwa perusahaan memiliki peran positif terhadap masyarakat dan lingkungan secara umum.

Pada tahun 2007 Reputation Institute (RI) telah mengembangkan sebuah barometer standar reputasi untuk mengukur berbagai reputasi yang dimiliki oleh berbagai perusahaan, dan secara teratur melakukan survei ke publik yang mengevaluasi beberapa perusahaan ternama di dunia. RI menggambarkan persepsi mengenai reputasi ke dalam tujuh dimensi yang didefinisikan sebagai berikut:⁵²

- a. *Performance* (kinerja), persepsi mengenai hasil dan prospek keuangan perusahaan.
- b. *Workplace* (tempat kerja), persepsi terhadap lingkungan kerja di perusahaan tersebut dengan kualitas karyawannya
- c. *Product* (produk), persepsi terhadap kualitas harga dari produk dan jasa yang ditawarkan oleh perusahaan.

⁵² Ibid, halaman 99.

- d. *Leadership* (kepemimpinan), persepsi terhadap seberapa baik perusahaan itu dipimpin.
- e. *Citizenship* (keterlibatan), persepsi terhadap kekuatan lingkungan dan tanggungjawab sosial perusahaan.
- f. *Governance* (tata laksana), persepsi mengenai sistem organisasi dan budaya perusahaan.
- g. Innovation (inovasi), persepsi terhadap orientasi dan inovasi kewirausahaan perusahaan.

Berdasarkan penjelasan di atas mengenai reputasi, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa *reputation* dari penyelenggaraan ujian nasional merupakan bentuk evaluasi yang merujuk pada realita penyelenggaraan ujian nasional sehingga dapat menimbulkan asumsi publik tentang baik buruknya penyelenggaraan ujian tersebut. Indikator dalam menilai reputasi penyelenggaraan ujian nasional yang digunakan oleh peneliti adalah sebagai berikut:

- a. Orientasi kepada siswa, merujuk pada persepsi siswa atas kesediaan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi mereka.
- b. Pemberi kerja yang baik, merujuk pada persepsi siswa mengenai bagaimana pihak pemerintah dan elemen pendidikan yakni sekolah memperlakukan siswa dan memperhatikan kebutuhan mereka.
- c. Penyelenggaraan ujian nasional dapat diandalkan dan kuat secara finansial, merujuk pada persepsi siswa dan sekolah terhadap pemerintah dalam hal kecakapan, ketangguhan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta dapat meminimalisir dana anggaran yang dikeluarkan.
- d. Kualitas tampilan soal ujian nasional, merujuk pada persepsi siswa akan kualitas, inovasi, nilai, dan kehandalan dari tampilan soal serta pelayanan pada saat penyelenggaraan ujian nasional.
- e. Tanggung jawab sosial dan lingkungan, merujuk pada kepercayaan siswa dan sekolah bahwa pemerintah memiliki peran positif terhadap masyarakat dan lingkungan secara umum.

2. *Ability to Observe*

Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan *ability* atau kemampuan dengan kesanggupan, kecakapan, kekuatan⁵³. Kemampuan diartikan pula sebuah kecakapan atau potensi seseorang individu untuk menguasai keahlian dalam melakukan atau mengerjakan beragam tugas dalam suatu pekerjaan atau suatu penilaian atas tindakan seseorang⁵⁴. Berdasarkan penjelasan tersebut dapat diartikan bahwa *ability* atau kemampuan adalah kesanggupan suatu objek untuk melakukan suatu tugas atau pekerjaan.

Observe atau mengamati merupakan melihat dengan hati-hati cara sesuatu terjadi atau cara melakukan sesuatu⁵⁵. *Observe* juga dapat diartikan sebagai melihat atau memperhatikan dengan teliti⁵⁶. Oleh karena itu, mengamati dapat diartikan sebagai kegiatan melihat dengan hati-hati dan teliti. Berdasarkan penjelasan di atas, *ability to observe* atau kemampuan untuk mengamati yakni kesanggupan suatu objek untuk melihat dengan hati-hati dan teliti. Apabila merujuk pada suatu penilaian, maka *ability to observe* merupakan kesanggupan suatu bentuk penilaian dalam melakukan tugasnya. Menurut Kunandar, pada hakikatnya kesanggupan suatu penilaian merujuk pada tujuan penilaian tersebut, yakni:⁵⁷

- a. Melacak kemajuan siswa, artinya dengan melakukan penilaian maka dapat diketahui perkembangan hasil belajar siswa yakni menurun atau meningkat.
- b. Mengecek ketercapaian kompetensi siswa, artinya dengan melakukan penilaian maka dapat diketahui apakah siswa telah menguasai kompetensi tersebut ataukah belum.

⁵³ <http://kbbi.web.id/mampu> diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

⁵⁴ Syafaruddin, *Pendidikan dan Pemberdayaan Masyarakat*, (Medan: Perdana Publishing, 2012), 72.

⁵⁵ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/observe> diakses pada tanggal 4 Januari 2017

⁵⁶ <http://kbbi.web.id/amat-2> diakses pada tanggal 4 Januari 2017.

⁵⁷ Kunandar, *Penilaian Autentik (Penilaian Hasil Belajar Peserta Didik Berdasarkan Kurikulum 2013) Suatu Pendekatan Praktis Disertai dengan Contoh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2015), 70.

- c. Mendeteksi kompetensi yang belum dikuasai oleh siswa artinya dengan melakukan penilaian maka dapat diketahui kompetensi mana yang belum dikuasai atau kompetensi mana yang telah dikuasai.
- d. Menjadi umpan balik untuk perbaikan bagi siswa, artinya dengan melakukan penilaian, maka dapat dijadikan bahan acuan untuk memperbaiki hasil belajar.

Berdasarkan pendapat Chittenden, penilaian hasil belajar diarahkan pada empat hal, yaitu:⁵⁸

- a. Penelusuran, yaitu kegiatan yang dilakukan untuk menelusuri apakah proses pembelajaran telah berlangsung sesuai yang direncanakan atau tidak.
- b. Pengecekan, yaitu untuk mencari informasi apakah terdapat kekurangan-kekurangan pada siswa selama proses pembelajaran.
- c. Pencarian, yaitu untuk mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul.
- d. Penyimpulan, yaitu untuk menyimpulkan tentang tingkat pencapaian belajar yang telah dimiliki siswa.

Apabila merujuk pada penyelenggaraan ujian nasional, maka *ability to observe* dari penyelenggaraan ujian nasional yakni kesanggupan ujian nasional untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa secara nasional. Kesanggupan ujian nasional untuk melakukan evaluasi hasil belajar siswa apabila pada keempat tahap yakni penelusuran, pengecekan, pencarian, dan penyimpulan mendapatkan hasil yang diharapkan. Berikut penjelasan dari keempat tahap tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Penelusuran, mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mengetahui perkembangan hasil belajar siswa.
- b. Pengecekan, mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mencari informasi apakah terdapat kekurangan pada pencapaian kompetensi siswa.

⁵⁸ Eko Putro Widoyoko, *Evaluasi Program Pembelajaran: Panduan Praktis bagi Pendidik dan Calon Pendidik*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2011), 31-32.

- c. Pencarian, mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul.
- d. Kesimpulan, mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu memberikan simpulan yang akan dijadikan acuan perbaikan hasil belajar siswa yang masih di bawah standar.

3. *Vested Interest*

Vested memiliki makna yakni memberikan kepemilikan atau kepentingan (sesuatu) secara resmi atau umum⁵⁹. *Interest* memiliki makna yakni perasaan yang ingin memberikan perhatian kepada sesuatu atau ingin terlibat untuk menemukan lebih banyak tentang sesuatu tersebut⁶⁰. Menurut Weber, kepentingan akan mendorong tindakan manusia yang akan menentukan arah tindakan yang akan diambil. Suatu kepentingan terdapat pertimbangan peran dari orang lain ketika mencoba merealisasikan kepentingan tersebut⁶¹. Kepentingan yang kuat yakni kepentingan yang terdapat maksud di dalamnya sehingga didapatkan keuntungan dari itu⁶². Oleh karena itu, *vested interest* dapat pula disebut kepentingan yang memiliki maksud tertentu. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dinyatakan bahwa *vested interest* yakni kepentingan yang terdapat maksud di dalamnya sehingga dapat mempengaruhi arah tindakan yang diambil.

Berdasarkan konteks penyelenggaraan ujian nasional, *vested interest* yakni bentuk evaluasi yang merujuk pada kepentingan yang mendasari penyelenggaraan ujian nasional. Analisis mengenai *vested interest* pada penyelenggaraan ujian nasional dapat membantu untuk menjelaskan konflik yang muncul ketika terjadi benturan dalam kebijakan negara mengenai pendidikan. Dikatakan bermanfaat harus memenuhi

⁵⁹ <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/vested> diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

⁶⁰ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/interest> diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

⁶¹ Titik Sumarti, “*Sosiologi Kepentingan (Interest) dalam Tindakan Ekonomi*”, (Paper presented at Bedah Buku: *Principles of Economic Sociology* (Richard Swedberg, 2003), Bogor, 2005), 1.

⁶² <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/vested-interest> diakses pada tanggal 6 Januari 2017.

beberapa kriteria, yaitu: 1) Berfungsi dalam realitas nyata sehingga dapat menggugah vitalitas hidup dan kemajuan pendidikan; 2) Dapat ikut menjawab atau memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan; 3) Merefleksikan tuntutan lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik di dalam negara⁶³.

4. *Expertise*

Expertise dapat diartikan sebagai pengetahuan tingkat tinggi atau keterampilan⁶⁴. *Expertise* juga dapat diartikan sebagai pengetahuan yang diperoleh dengan benar-benar⁶⁵. Oleh karena itu, *expertise* dapat diartikan sebagai keahlian. Menurut Hayes-Roth mendefinisikan keahlian sebagai keberadaan dari pengetahuan tentang suatu lingkungan tertentu, pemahaman terhadap masalah yang timbul dalam lingkungan tersebut, dan keterampilan untuk memecahkan masalah tersebut⁶⁶. Apabila dikaitkan dengan sebuah evaluasi, maka evaluasi tersebut harus menekankan kedalaman pengetahuan dan keahlian yang berarti bahwa dalam mengukur kedalaman terhadap penguasaan kompetensi tertentu harus secara objektif⁶⁷.

Objektif memiliki arti bahwa evaluasi tersebut berbasis pada standar dan tidak dipengaruhi faktor subjektivisme penilai⁶⁸. Menurut Sigalingging, prinsip objektif menekankan pada keabsahan data hasil evaluasi dengan apa adanya tanpa dibuat-buat sesuai dengan data aslinya⁶⁹. Objektif dalam menjalankan tugasnya dengan bertindak jujur, tegas, tanpa pretensi sehingga dapat bertindak adil, tanpa dipengaruhi

⁶³ Titik Sumarti, "Sosiologi Kepentingan (*Interest*) dalam Tindakan Ekonomi, *Sodality: Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia*, 1: 2, (Agustus, 2007), 284.

⁶⁴ <http://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/expertise> diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

⁶⁵ <https://www.merriam-webster.com/thesaurus/expertise> diakses pada tanggal 8 Januari 2017

⁶⁶ Ndaru Winantyadi dan Indarto Waluyo, "Pengaruh Pengalaman, Keahlian, Situasi Audit, dan Etika Terhadap Skeptisisme Profesional Auditor (Studi Kasus pada KAP di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta)", *Jurnal Nominal*, 3: 1, (2014), 17.

⁶⁷ *Ibid*, halaman 39.

⁶⁸ *Ibid*, halaman 51.

⁶⁹ Hamonangan Sigalingging, *Paparan Mata Kuliah Pengembangan Assesmen Pembelajaran PKn di Sekolah*, (Semarang: FIS UNNES, 2010), 13-14.

tekanan atau permintaan pihak tertentu untuk memenuhi kepentingan pribadinya⁷⁰. Oleh karena itu, objektif dapat dinilai dari kejujuran, keteguhan serta adil. Berdasarkan penjelasan tersebut, dapat dikatakan bahwa *expertise* dari penyelenggaraan ujian nasional yakni bentuk evaluasi yang dinilai objektif dalam pelaksanaannya yang meliputi kejujuran, keteguhan, dan keadilan.

5. *Neutrality*

Neutrality diartikan sebagai kurangnya pilih kasih terhadap satu sisi atau kualitas atau keadaan yang netral⁷¹. *Neutrality* atau netralitas adalah tingkatan sejauh mana sikap tak memihak⁷². Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, netralitas diartikan sebagai keadaan dan sikap netral (tidak memihak, bebas)⁷³. Netralitas juga dapat dikatakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu kekuatan, sehingga memungkinkan suatu kebijakan berfungsi secara adil dalam *public service*⁷⁴. McQuail menguraikan beberapa indikator netralitas yakni:⁷⁵

- a. Unsur personalisasi, yakni melihat ada-tidaknya peran yang berlebih-lebihan baik bernada positif maupun negatif sensasionalisme. Berdasarkan pandangan McQuail, unsur personalisasi ini menyebabkan minimnya keberagaman, kebenaran dan kualitas informasi dan berimplikasi pada pembatasan pengetahuan masyarakat tentang peristiwa sebenarnya (kondisi objektif).
- b. Stereotype, yakni sebuah pandangan (cara pandang) terhadap suatu objek dimana cara pandang tersebut kemudian melekat, menyebar, meluas dan menjadi

⁷⁰ Lauw Tjun Tjun, dkk, “Pengaruh Kompetensi dan Independensi Auditor Terhadap Kualitas Audit”, *Jurnal Akuntansi*, 4: 1, (Mei, 2012), 45.

⁷¹ <https://www.merriam-webster.com/dictionary/neutrality> diakses pada tanggal 8 Januari 2017.

⁷² <http://kbbi.web.id/netralitas> diakses pada tanggal 8 Januari 2017

⁷³ <http://kbbi.web.id/netralitas> diakses pada tanggal 9 Januari 2017.

⁷⁴ MHD. Rafi Yahya dan Dyah Mutiarin, “Model Lelang Jabatan di Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta”, *Jurnal Ilmu Pemerintahan & Kebijakan Publik*, 2: 2, (Juni, 2015), 299.

⁷⁵ Amir Effendi Siregar, dkk, “Menakar Independensi dan Netralitas Jurnalisme dan Media di Indonesia”, *Jurnal Dewan Pers*, Edisi 9, (Juni, 2014), 7.

kepercayaan orang lain sebagai sesuatu kebenaran. Efek stereotype ditandai dengan munculnya kepercayaan, harapan, atau suatu pemikiran yang dipegang oleh khalayak umum tentang bagaimana menggolongkan suatu objek yang kemudian memiliki pengaruh pada cara bersikap atau berperilaku.

Beberapa faktor yang mempengaruhi netralitas dapat diukur dengan indikator sebagai berikut; 1) Sejauhmana keberpihakan kebijakan pada salah satu yang memiliki kepentingan; 2) Konsistensi terhadap tujuan dan fungsinya, 3) Kemampuan untuk memilih dan memilah antara kepentingan untuk para pembuat kebijakan ataukah para penyelenggara kebijakan⁷⁶. Berdasarkan penjelasan di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa netralitas adalah tingkatan sejauh mana sikap tak memihak kepada siapapun. Apabila merujuk pada penyelenggaraan ujian nasional, maka netralitas yakni bentuk evaluasi terhadap sejauh mana sikap tak memihak kepada siapapun pada penyelenggaraan ujian nasional. *Neutrality* pada penyelenggaraan ujian nasional adalah sebagai berikut:

- a. Sejauhmana keberpihakan penyelenggaraan ujian nasional pada pemegang kebijakan.
- b. Kekonsistensian penyelenggaraan ujian nasional terhadap tujuan, fungsi, dan manfaatnya.
- c. Kemampuan untuk memilah dan memilih sebuah pandangan tentang kebijakan mana yang memiliki kepentingan dan mana yang tidak.

Berdasarkan penjelasan mengenai kriteria kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional, maka peneliti bermaksud menggunakannya sebagai pedoman dalam membandingkan kredibilitas penyelenggaraan Ujian Nasional *Paper Based Test* (UN-PBT) dan Ujian Nasional *Computer Based Test* (UN-CBT). Adapun bentuk kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional menurut kriteria RAVEN yang ditampilkan dalam bentuk Tabel 2.1 adalah sebagai berikut:

⁷⁶ Ibid, halaman

Tabel 2.1
Indikator Kredibilitas Penyelenggaraan Ujian Nasional
Berdasarkan Kriteria RAVEN

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
Kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional	<i>Reputation</i>	R1	Orientasi kepada siswa, merujuk pada persepsi siswa atas kesediaan pemerintah untuk memberikan pelayanan pendidikan yang terbaik bagi mereka.
		R2	Pemberi kerja yang baik, merujuk pada persepsi siswa mengenai bagaimana pihak pemerintah dan elemen pendidikan yakni sekolah memperlakukan siswa dan memperhatikan kebutuhan mereka.
		R3	Penyelenggaraan ujian nasional dapat diandalkan dan kuat secara finansial, merujuk pada persepsi siswa dan sekolah terhadap pemerintah dalam hal kecakapan, ketangguhan, dan kemampuan dalam melaksanakan tugas sebagaimana mestinya serta dapat meminimalisir dana anggaran yang dikeluarkan.
		R4	Kualitas tampilan soal ujian nasional, merujuk pada persepsi siswa akan kualitas, inovasi, nilai, dan kehandalan dari tampilan soal serta pelayanan pada saat penyelenggaraan ujian nasional.
		R5	Tanggung jawab sosial dan lingkungan, merujuk pada kepercayaan siswa dan sekolah bahwa pemerintah memiliki peran positif terhadap masyarakat dan lingkungan secara umum.

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
Kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional	<i>Ability to observe</i>	A1	Penelurusan: mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mengetahui perkembangan hasil belajar siswa.
		A2	Pengecekan: mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mencari informasi apakah terdapat kekurangan pada pencapaian kompetensi siswa.
		A3	Pencarian: mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu mencari dan menemukan penyebab kekurangan yang muncul.
		A4	Penyimpulan: mengindikasikan bahwa diselenggarakannya ujian nasional mampu memberikan simpulan yang akan dijadikan acuan perbaikan hasil belajar siswa yang masih di bawah standar.
	<i>Vested Interest</i>	V1	Berfungsi dalam realitas nyata sehingga dapat menggugah vitalitas hidup dan kemajuan pendidikan
		V2	Dapat ikut menjawab atau memecahkan masalah-masalah dalam pendidikan
		V3	Merefleksikan tuntutan lingkungan ekonomi, sosial budaya dan politik di dalam negara
	<i>Expertise</i>	E1	Kejujuran
		E2	Keteguhan
		E3	Keadilan

Variabel	Sub Variabel	Indikator	
Kredibilitas penyelenggaraan ujian nasional	<i>Neutrality</i>	N1	Sejauhmana keberpihakan penyelenggaraan ujian nasional pada pemegang kebijakan.
		N2	Kekonsistensian penyelenggaraan ujian nasional terhadap tujuan, fungsi, dan manfaatnya.
		N3	Kemampuan untuk memilah dan memilih sebuah pandangan tentang kebijakan mana yang memiliki kepentingan dan mana yang tidak.

